

Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, *Size*, *Leverage*, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Junita Putri Rajana Harahap
Universitas Muslim Nusantara
ririeharahap87@gmail.com

Murni Daulay
Universitas Sumatera Utara

Zainul Bahri Torong
Universitas Sumatera Utara

Abstract

This research aimed to identify and analyze the effect of the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, size, leverage, and the local revenue (PAD) simultaneously and partial on economic growth in the regencies and cities in North Sumatra and also to identify and analyze capital expenditures variable as moderator variable which could moderated the relationship between independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, size, leverage, and PAD in the regencies and cities in North Sumatra. This research was classified as descriptive quantitative and the objects of this research were all regencies and cities in the province of North Sumatra. The data used was a secondary data obtained from the report of the regencies and cities' APBD in North Sumatra 2011-2015. By using a quantitative approach and the data were analyzed by using multiple linear regression analysis. The result showed independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, size, leverage, and PAD had significant effect on economic growth simultaneously. Partially, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, size, and PAD had positive and significant effect on economic growth while leverage had no significant effect on economic growth of regencies and cities in north Sumatra. Moderator variable was able to moderate independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, size, leverage, PAD on economic growth in all regencies and cities in North Sumatra.

Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Size, Leverage, PAD, Economic Growth, Capital Expenditure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efek rasio kemerdekaan, efektivitas rasio, efisiensi rasio, ukuran, leverage, dan pendapatan daerah (PAD) secara bersamaan dan parsial pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan kota di Sumatera Utara dan juga untuk mengidentifikasi dan menganalisa variabel belanja modal sebagai moderator variabel yang dapat dikelola hubungan antara rasio kemerdekaan, efektivitas rasio, efisiensi rasio, ukuran, leverage, dan PAD di Kabupaten dan kota di Sumatera

Utara. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai deskriptif kuantitatif dan objek penelitian ini adalah semua Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang Diperoleh dari laporan Kabupaten dan mengutip APBD di utara Sumatra 2011-2-15 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasilnya menunjukkan rasio kemerdekaan, efektivitas rasio, efisiensi rasio, ukuran, leverage, dan PAD memiliki efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Sebagian, rasio kemerdekaan, efektivitas rasio, efisiensi rasio, ukuran, dan PAD memiliki efek positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi sementara leverage tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Moderator variabel mampu moderat kemerdekaan rasio, rasio efektivitas dan efisiensi rasio, ukuran, leverage, PAD pada pertumbuhan ekonomi di semua Kabupaten dan kota-kota di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Rasio kemerdekaan, efektivitas rasio, efisiensi rasio, ukuran, Leverage, PAD, pertumbuhan ekonomi, belanja modal.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hasan (2012), pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah maka pemerintah dan investor bersama-sama perlu melihat faktor-faktor kinerja keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, *size*, *leverage* dan pendapatan asli daerah (PAD). Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya.

Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah. Rasio efektifitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektifitas pendapatan dihitung dengan cara

membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Suhardjanto et al, 2010). Semakin besar nilai total asetnya maka akan semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pada pemerintah yang mempunyai ukuran kecil. Hal ini akan memberikan dampak pada kinerja keuangannya. *Leverage* berhubungan dengan penggunaan aktiva dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Penelitian yang dilakukan Weill (2007) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri.

Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada 2016 bisa lebih tinggi atau 5,1% dari 2015 yang diprediksi hanya sekitar 4,8% lebih. Meski diprediksi naik, pertumbuhan ekonomi 2016 tetap lebih

rendah dari target awal Pemerintah Provinsi Sumut 2015 yang sebesar 6,28%. BI mengakui, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat didorong oleh melambatnya pertumbuhan konsumsi yang merupakan komponen terbesar pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perlu mendapat perhatian serius. (Beritasatu.com). Alokasi belanja modal yang tergolong belanja pembangunan dan bersifat produktif diduga dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Halim dan Abdullah (2006), menunjukkan alokasi belanja modal erat hubungannya dengan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka topik penelitian ini adalah Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, *Size*, *Leverage*, dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Hasan (2012), Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Azhar: 2008). Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi

maupun organisasi (Hamzah: 2008). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Menurut Munir, dkk (2004) “Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Dari definisi tersebut, selanjutnya Halim (2007) menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Halim (2004), “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang (Bastian: 2006). Pengukuran kinerja pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, dimaksudkan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Suprpto, 2006). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 2004). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Keberhasilan dan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapakan transfer dana dari pemerintah pusat. “Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

Hal ini juga telah disebutkan didalam Al-Quran bahwasanya kita kita harus bersikap adil serta dapat menyampaikan amanat, hal di sebutkan di dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

2. Rasio Efektifitas

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektifitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektifitas. Pengertian efektifitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:134) adalah ukuran

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Munir (2004:48), analisis efektifitas pengelolaan anggaran daerah adalah dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran.

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Mardiasmo (2004:133) mengatakan bahwa: “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

Dalam bidang ekonomi *size* menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya yang berhubungan dengan materialitas (Surepno, 2013). Hal ini berkaitan dengan tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik, pemerintah harus didukung oleh aktiva/aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitasari: 2012).

Sumarjo (2010) melakukan penelitian mengenai ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Sumarjo (2010) tersebut dapat diasumsikan bahwa semakin besar nilai total asetnya maka akan semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah

tersebut. Kinerja pemerintah yang baik nantinya akan berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Leverage

Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari: 2009).

Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Perwitasari (2010), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

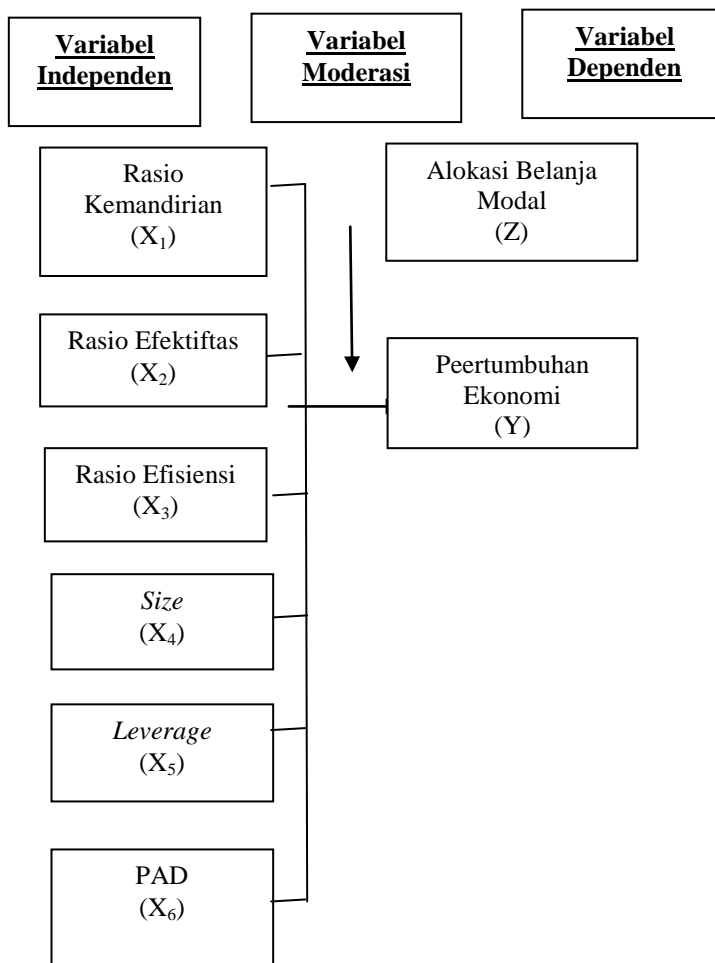
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena PAD tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya (Pradita, 2013).

Alokasi Belanja Modal

Alokasi belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Alokasi belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2004).

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Persyaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk.

Kerangka Konseptual



Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 33 Kabupaten/Kota dengan tahun pengamatan mulai dari tahun 2011 sampai 2015. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sensus atau sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan atau dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2008) sebanyak 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 333 x5 tahun yaitu 165 data, dengan metode data *time series* secara *crosssection*.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji residual untuk variabel moderasi. Adapun persamaan dalam hipotesis pertama adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Hasil Dan Pembahasan

Tabel Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

				Std.	
	Mi	Ma	Mea	Deviati	
	N	n	x	n	on
Ln_X	16	1.9	6.7	2.45	1.01
1	5	0	8		
Ln	16	1.7	7.9	2.19	.54
_X2	5	0	7		
Ln	16	2.1	6.1	2.46	.86
_X3	5	2	1		
Ln	16	1.0	6.6	3.35	.27
_X4	5	9	6		

Ln	16	2.6	9.2	4.52	.73
_X5	5	6	3		
Ln	16	1.7	10.	5.17	1.01
_X6	5	2	44		
Y	16	2.3	9.2	4.62	1.66
	5	0	1		
Z	16	1.0	10.	2.69	.40
	5	2	81		
Valid	16				
N	5				
(listwi					
se)					

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dengan uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji F (Simultan)

Diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan signifikansi 0,005 atau lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ jadi posisi titik uji signifikansi berada pada wilayah menerima H_1 dan menolak H_0 . Artinya bahwa secara simultan rasio kemandirian (x_1), rasio efektifitas (x_2), rasio efisiensi (x_3), *size* (x_4), *leverage* (x_5) dan PAD (x_6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu independen secara individual dalam menerangkan variasi independen.

1. Rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio efektifitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. *Size* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4. *Leverage* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Uji Residual (Moderating)

Dilakukan untuk melihat apakah variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil asil uji statistik t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar - 0,276 dan nilai signifikan moderating sebesar 0,203 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Alokasi belanja modal bukan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, *Size*, *Leverage* dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Sumatera Utara, artinya alokasi belanja modal tidak memoderasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan

Rasio kemandirian (X_1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian, antara lain penelitian Astuti (2015) dan penelitian Greydi dkk (2015) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki PAD yang lebih tinggi daripada jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat. Hal ini juga sejalan dengan Bisma (2010) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang mampu menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin mandiri suatu daerah, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tersebut. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan mandirinya keuangan suatu daerah tersebut.

Rasio efektifitas (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejalan maupun tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah:

- Astuti (2015) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

- Greydi dkk (2015) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini adalah :

- Syamsuddin (2012) menyatakan bahwa rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan Dwirandra (2006), bahwa semakin tinggi rasio efektifitas berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan suatu daerah, sehingga semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu daerah tersebut maka akan semakin maksimal pula peranan pendapatan daerah dalam menjalankan roda perekonomian daerah tersebut. Akhirnya daerah tersebut akan mampu meningkatkan pertumbuhannya.

Rasio efisiensi (X_3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejalan maupun tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamzah (2008) yang juga mengatakan bahwa rasio efisiensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian : Astuti (2015). dan Syamsuddin dkk (2012) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Size (X_4) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitasari (2012) menyatakan semakin besar ukuran suatu daerah, maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah yang nantinya akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, *size* yang dimaksud adalah besarnya aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Asset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kinerja yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Leverage (X_5) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam penelitian Sesotyaningtyas (2012) dan Weill (2003) yang menunjukkan adanya hubungan antara *leverage* dan pengukuran kinerja suatu daerah. Buruknya kinerja keuangan suatu daerah yang diakibatkan oleh tingginya tingkat hutang (*leverage*) yang dimiliki pemerintah tersebut, tentu akan mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Weston dan Copeland (1997) mengemukakan konsekuensi dalam *leverage*, apabila dari penggunaan hutang ternyata tingkat pengembalian atas aktiva (return) lebih besar dari biaya hutang, *leverage* tersebut menguntungkan dan hasil pengembalian atas modal dengan penggunaan *leverage* ini juga meningkat, sebaliknya jika hasil pengembalian atas aktiva lebih kecil daripada biaya hutang, maka *leverage* akan mengurangi tingkat pengembalian atas modal. Makin besar *leverage* yang digunakan suatu daerah, maka akan semakin besar pengurangannya. Sebagai akibatnya, *leverage* dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas, tetapi dengan risiko akan meningkatkan kerugian pada masa suram. Jadi keuntungan dan kerugian, dalam hal ini meningkat atau turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan diperbesar oleh *leverage*, semakin besar *leverage* yang digunakan suatu daerah maka semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

PAD (X_6) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiyawati dan Hamzah (2007) yang juga mengatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putu dan Nyoman (2015) dan juga penelitian Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Alokasi belanja modal tidak memberikan pengaruh antara rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, *size*, *leverage* dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sukarmi dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebagai populasi dalam penelitian ini sudah mandiri, sudah efektif, sudah efisien, dan sudah memaksimalkan PAD dalam rangka mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak perlu mengalokasikan dana untuk menambah aktivitasnya dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *size*, *leverage* dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Sumatera Utara
2. Secara parsial hasil penelitian sebagai berikut:
Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *size*, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten / kota di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten / kota di provinsi Sumatera Utara.
3. Alokasi belanja modal bukan sebagai variabel moderating yang memoderasi antara rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *size*, *leverage* dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Astuti, 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011) *Jurnal EBBANK* ▪ Vol.6 ▪ No. 1 ▪ Hal.1-18 ▪ Juli 2015
- Bastian Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar, Erlangga.Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto, 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 -2007, Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, Desember 2010
- Brodjonegoro, Bambang. 2003, “Dua Setengah Tahun Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Mendorong Investasi”, *Kongres ISEI*. Malang
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Fitri, Villa Kurniasih. 2013. Pengaruh rasio keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Riau Tahun 2009-2012. *Jurnal Universitas Riau*. Riau

- Ghozali, Imam. 2008. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Greydi, 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Magister Ilmu Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Halachmi, Arie. 2005. Performance Measurement is Only One Way of managing Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol.54: 502-516.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah (2008). *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006*. Universitas Trunojoyo.
- Hamzah. 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : Bumi. Aksara
- Hariato, David dan Adi, Priyo Hari. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Hasan, T.I.B. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*,
- Ismerdekaningsih, Herlina dan Rahayu, Endah Sri (2002), *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*. ITB Central Library.
- Kalalo, Nadya Pretti, dkk. 2014. *Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado*. Jurnal EMBA. Volume 2. Nomor 1.
- Kuncoro. Mudrajat. 2003. *Metode Riset Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
- Machmud dkk 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 no. 2 - Mei 2014
- Mahmudi, (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Mahsun. H. Andre. P. & Firman. S, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan keempat. Edisi Ketiga. Yogyakarta.

- Mahsun, Mohammad, 2006. *Pengaruh Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2007. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasari, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Maryanti, Endrawati.S. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat).
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Pradita, Okta Rezika., 2013. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governanace Terhadap Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2005-2008. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Putu, Nyoman. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 [7] : 794-810. ISSN 2303-0178
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 93 tahun 2016 tentang Anggaran Belanja*.
- Santoso, Singgih. 2012. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Elex Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. Volume. 1: Nomor. 1: 1-6
- Setiyawati, Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Desember 2007, Vol.4, No. 2.

- Soamole, Budiman (2012). *Analisis Persepsi Penumpang terhadap Kualitas Pelayanan Angkutan Laut di Pelabuhan Regional Sanana Kabupaten kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Thesis. UAJY.
- Solikin, Ikin, 2010. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Jawa Barat*. Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Cetakan Keenam, Penerbit Alfabeta.
- Suhardhanto, et al. 2010. "Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities". *Journal Public Policy January 2010*.
- Sukarmi, Ni Wayan dan Budiasih, I.N 2016. Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3 (2016) : 545-572. ISSN : 2337-3067.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Diakses: [www:djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses ww:djlpe.esdm.go.id/modules.
- Weston dan Copeland. 1997. *Manajemen Keuangan Jilid 2 Edisi 9*. (Penerjemah : Jaka Wasana dan Kibrandoko. Jakarta : Binarupa : Aksara.
- Wild, John J, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005. *Financial Statement Analysis*, Edisi 8, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.